

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
AUDITED



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
*AUDITED***

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal

Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta Pusat

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TA 2016 *Audited* ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2017

Sekretaris Jenderal,



MARUF CAHYONO, S.H.,M.H.
NIP 19670429 199503 1 001

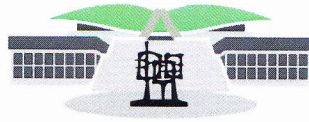
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW	viii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	9
A.2. Kebijakan Teknis MPR	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	27
B.2. Belanja Negara	29
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	38
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Aset Lainnya	50
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	52
C.5. Ekuitas	55
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	56
D.2. Beban Pegawai	56
D.3. Beban Persediaan	58
D.4. Beban Barang dan Jasa	58
D.5. Beban Pemeliharaan	59
D.6. Beban Perjalanan Dinas	60
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	61
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	61
D.9. Beban Peyisihan Piutang Tak Tertagih	62
D.10 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	62
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	64
E.2. Surplus(Defisit)-LO	64
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan	64
E.4. Penyesuaian Nilai Aset	64
E.5. Koreksi Nilai Persediaan	64
E.6. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	65
E.7. Transaksi Antar Entitas	65
E.8. Ekuitas Akhir	66
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
F.1. Rekening Pemerintah	67
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	67
VI. Lampiran dan Daftar	

Tabel	1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	2
Tabel	2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	2
Tabel	3	Ringkasan Laporan Operasional Per 31 Desember 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	3
Tabel	4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	4
Tabel	5	Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	15
Tabel	6	Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel	7	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel	8	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud	23
Tabel	9	Rincian Estimasi Realisasi Pendapatan dan PNBP lainnya TA 2016 <i>Audited</i>	27
Tabel	10	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	27
Tabel	11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 <i>Audited</i> menurut Program	29
Tabel	12	Rincian Realisasi Belanja Menurut Kegiatan TA 2016 <i>Audited</i> (Neto) ..	30
Tabel	13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2016 <i>Audited</i>	31
Tabel	14	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	32
Tabel	15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 <i>Audited</i> (Neto)	32
Tabel	16	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	33
Tabel	17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2016 <i>Audited</i> (Neto)	34
Tabel	18	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	35
Tabel	19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2016 <i>Audited</i> (Neto)	36
Tabel	20	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	37
Tabel	21	Rincian Aset Lancar per 31 Des 2016 <i>Audited</i> dan per 31 Des 2015 <i>Audited</i>	38
Tabel	22	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per-Eselon I.....	39
Tabel	23	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	39
Tabel	24	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Des 2016 <i>Audited</i> dan 31 Des 2015 <i>Audited</i>	40

Tabel 25	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per-Eselon I	40
Tabel 26	Rincian Piutang Bukan Pajak per-Eselon I	40
Tabel 27	Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak	41
Tabel 28	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per-Eselon I	41
Tabel 29	Rincian Persediaan per-Eselon I	42
Tabel 30	Rincian Persediaan per 31 Des 2016 dan 31 Des 2015 Audited	42
Tabel 31	Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Des 2016 <i>Audited</i>	43
Tabel 32	Perbandingan Aset Tetap per 31 Des 2016 dan 31 Des 2015 <i>Audited</i> ...	43
Tabel 33	Rincian Aset Tetap per-Eselon I	43
Tabel 34	Rincian Tanah	44
Tabel 35	Rincian Tanah per-Eselon I	44
Tabel 36	Rincian Peralatan dan Mesin per-Eselon I	45
Tabel 37	Rincian Gedung dan Bangunan per-Eselon I	47
Tabel 38	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per-Eselon I	48
Tabel 39	Rincian Aset Tetap Lainnya per-Eselon I	48
Tabel 40	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	49
Tabel 41	Rincian Aset Lainnya per-Eselon I	50
Tabel 42	Rincian Aset Tak Berwujud	51
Tabel 43	Rincian Aset Tak Berwujud per-Eselon I	51
Tabel 44	Rincian Aset Lain-lain per-Eselon I	51
Tabel 45	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	52
Tabel 46	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	53
Tabel 47	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per-Eselon I	53
Tabel 48	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per-Eselon I	53
Tabel 49	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Des 2016 <i>Audited</i>	54
Tabel 50	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka per-Eselon I	54
Tabel 51	Rincian Uang Muka dari KPPN per-Eselon I	54
Tabel 52	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	55
Tabel 53	Rincian Ekuitas per-Eselon I	55
Tabel 54	Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	57
Tabel 55	Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	58
Tabel 56	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	59
Tabel 57	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 <i>Audited</i> dan	

		TA 2015 <i>Audited</i>	60
Tabel	58	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	60
Tabel	59	Perbandingan Rincian Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	61
Tabel	60	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	62
Tabel	61	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	62
Tabel	62	Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2016 <i>Audited</i> dan TA 2015 <i>Audited</i>	63

Grafik	1	Komposisi Realisasi Pendapatan menurut ikhtisar MAP Untuk Periode TA 2016 <i>Audited</i> dan 2015 <i>Audited</i>	29
Grafik	2	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 <i>Audited</i> (Neto)	31



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta Pusat

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari: (a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, ~~20~~ April 2017

Sekretaris Jenderal,

MA'RUF CAHYONO, S.H.,M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TA 2016 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 *Audited*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 *Audited* yaitu berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.422.962.207,- atau mencapai 1.938,37 persen dari anggarannya sebesar Rp125.000.000,-

Realisasi Belanja untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 *Audited* yaitu sebesar Rp734.881.464.333,- atau mencapai 85,87 persen dari anggarannya sebesar Rp855.830.897.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk transaksi sampai dengan 31 Desember 2016 *Audited* dan 2015 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel 1**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 Audited dan 2015 Audited**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 Audited			31 Desember 2015 Audited
	Anggaran	Realisasi	% Real thd. Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	Rp 125.000.000,00	Rp 2.422.962.207	1.938,37	Rp 1.046.557.800
Belanja Negara	Rp 855.830.897.000	Rp 734.881.464.333	85,87	Rp 723.597.812.317

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2016 Audited dan 2015 Audited.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 Audited dicatat dan disajikan sebesar Rp638.949.371.447,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp20.018.539.412,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp608.001.741.491,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp10.929.090.544,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp9.598.773.643,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp629.350.597.804,-. Ringkasan Neraca TA 2016 Audited dan 2015 Audited dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2**Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 Audited dan 2015 Audited**

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	20.018.539.412	20.972.862.776	(954.323.364)	(4,55)
Aset Tetap	608.001.741.491	371.653.353.932	236.348.387.559	63,59
Aset Lainnya	10.929.090.544	12.056.967.435	(1.127.876.891)	(9,35)
Jumlah Aset	638.949.371.447	404.683.184.143	234.266.187.304	57,89
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	9.598.773.643	9.595.326.152	3.447.491	0,04
Jumlah Kewajiban	9.598.773.643	9.595.326.152	3.447.491	0,04
EKUITAS				
Ekuitas	629.350.597.804	395.087.857.991	234.262.739.813	59,29
Jumlah Ekuitas	629.350.597.804	395.087.857.991	234.262.739.813	59,29
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	638.949.371.447	404.683.184.143	234.266.187.304	57,89

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. (Defisit)-LO per 31 Desember 2016 Audited

dan 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar Rp(743.418.206.852,-) dan Rp(713.406.855.178,-), dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2016 *Audited* dicatat dan disajikan sebesar Rp(746.619.521.204,-), yang diperoleh dari nilai Pendapatan sebesar Rp150.623.753,- dan nilai Beban Operasional sebesar Rp746.770.144.957,-

Nilai Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2016 *Audited* dicatat dan disajikan sebesar Rp3.201.314.352,-

Nilai Surplus(Defisit) dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2016 *Audited* dicatat dan disajikan sebesar Rp0,-

Ringkasan Surplus(Defisit)-LO per 31 Desember 2016 dan 2015 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3

Ringkasan Laporan Operasional Per 31 Desember 2016 *Audited* dan 2015 *Audited*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 <i>Audited</i>	31 Desember 2015 <i>Audited</i>	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	150.623.753	153.460.516	(2.836.763)	(1,85)
Beban Operasional	746.770.144.957	713.386.930.155	33.383.214.802	4,68
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(746.619.521.204)	(713.233.469.639)	(33.386.051.565)	4,68
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	100.159.000	(2.363.025.975)	2.463.184.975	(104,24)
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.101.155.352	2.189.640.436	911.514.916	41,63
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.201.314.352	(173.385.539)	3.374.699.891	(1.946,36)
POS LUAR BIASA	0	0	0	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0,00
SURPLUS (DEFISIT) - LO	(743.418.206.852)	(713.406.855.178)	(30.011.351.674)	4,21

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp395.087.857.991,-, ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp743.418.206.852,-), ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp245.222.444.539,-, dan transaksi antar entitas senilai total Rp732.458.502.126,- sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 *Audited* adalah senilai Rp629.350.597.804,-

Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2016 Audited dan 2015 Audited

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 <i>Audited</i>	31 Desember 2015 <i>Audited</i>	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
EKUITAS AWAL	395.087.857.991	387.874.825.520	7.213.032.471	1,86
SURPLUS (DEFISIT) - LO	(743.418.206.852)	(713.406.855.178)	(30.011.351.674)	4,21
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	245.222.444.539	(1.931.366.868)	247.153.811.407	(12.796,83)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	732.458.502.126	722.551.254.517	9.907.247.609	1,37
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	234.262.739.813	7.213.032.471	227.049.707.342	3.147,77
EKUITAS AKHIR	629.350.597.804	395.087.857.991	234.262.739.813	59,29

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 *Audited* disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(*FACE REPORT*)
PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2016 DAN
31 DESEMBER 2015
AUDITED

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN /LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 *AUDITED* DAN 2015 *AUDITED*
(DALAM RUPIAH)

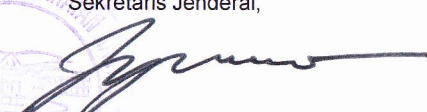
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>				31 DESEMBER 2015 <i>AUDITED</i>			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH									
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	125,000,000	2,422,962,207	2,297,962,207	1938.37%	0	1,046,557,800	1,046,557,800	0.00%
		125,000,000	2,422,962,207	2,297,962,207	1938.37%	0	1,046,557,800	1,046,557,800	0.00%
BELANJA NEGARA									
BELANJA TRANSAKSI KAS		855,830,897,000	734,881,464,333	(120,949,432,667)	85.87%	977,261,761,000	723,597,812,317	(253,663,948,683)	74.04%
RUPIAH MURNI		855,830,897,000	734,881,464,333	(120,949,432,667)	85.87%	977,261,761,000	723,597,812,317	(253,663,948,683)	74.04%
Belanja Pegawai	B.2.1	78,234,275,000	69,571,399,330	(8,662,875,670)	88.93%	33,311,902,000	29,784,545,620	(3,527,356,380)	89.41%
Belanja Barang	B.2.2	768,720,302,000	656,807,502,045	(111,912,799,955)	85.44%	913,647,745,000	670,382,963,710	(243,264,781,290)	73.37%
Belanja Modal	B.2.3	8,876,320,000	8,502,562,958	(373,757,042)	95.79%	30,302,114,000	23,430,302,987	(6,871,811,013)	77.32%
		855,830,897,000	734,881,464,333	(120,949,432,667)	85.87%	977,261,761,000	723,597,812,317	(253,663,948,683)	74.04%

Jakarta, 20 April 2017
Sekretaris Jenderal,


MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

NERACA
(*FACE REPORT*)

31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
AUDITED

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2016 AUDITED DAN 2015 AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2016 Audited	2015 Audited	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	4,636,093,012	7,454,782,424	(2,818,689,412)	(37.81)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	7,638,247,801	3,855,800,883	3,782,446,918	98.10
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	9,090,909	0	9,090,909	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.4	(45,455)	0	(45,455)	0.00
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.1.5	9,045,454	0	9,045,454	0.00
Persediaan	C.1.6	7,735,153,145	9,662,279,469	(1,927,126,324)	(19.94)
JUMLAH ASET LANCAR		20,018,539,412	20,972,862,776	(954,323,364)	(4.55)
ASET TETAP					
Tanah	C.2.1	343,728,232,605	97,527,032,605	246,201,200,000	252.44
Peralatan dan Mesin	C.2.2	139,263,126,534	133,823,058,674	5,440,067,860	4.07
Gedung dan Bangunan	C.2.3	203,328,496,465	202,293,300,154	1,035,196,311	0.51
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	13,646,277,700	13,646,277,700	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	60,618,883,915	59,891,063,198	727,820,717	1.22
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(152,583,275,728)	(135,527,378,399)	(17,055,897,329)	12.58
JUMLAH ASET TETAP		608,001,741,491	371,653,353,932	236,348,387,559	63.59
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1,246,944,540	1,246,944,540	0	0.00
Aset Lain-lain	C.3.2	12,093,595,400	12,093,595,400	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(2,411,449,396)	(1,283,572,505)	(1,127,876,891)	87.87
JUMLAH ASET LAINNYA		10,929,090,544	12,056,967,435	(1,127,876,891)	(9.35)
JUMLAH ASET		638,949,371,447	404,683,184,143	234,266,187,304	57.89
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	2,578,806,837	319,057,281	2,259,749,556	708.26
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	0	135,416,000	(135,416,000)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	4,636,093,012	7,454,782,424	(2,818,689,412)	(37.81)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.4	2,383,873,794	1,686,070,447	697,803,347	41.39
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		9,598,773,643	9,595,326,152	3,447,491	0.04
JUMLAH KEWAJIBAN		9,598,773,643	9,595,326,152	3,447,491	0.04
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	C.5	629,350,597,804	395,087,857,991	234,262,739,813	59.29
JUMLAH EKUITAS		629,350,597,804	395,087,857,991	234,262,739,813	59.29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		638,949,371,447	404,683,184,143	234,266,187,304	57.89

Jakarta, 20 April 2017
 Sekretaris Jenderal,

MA RUF CAHYONO, S.H.,M.H.
 NIP 19670429 199503 1 001

LAPORAN OPERASIONAL
(*FACE REPORT*)
PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2016 DAN
31 DESEMBER 2015
AUDITED

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 AUDITED DAN 2015 AUDITED
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN	
		TA 2016 AUDITED	TA 2015 AUDITED	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	150,623,753	153,460,516	(2,836,763)	(1.85)
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		150,623,753	153,460,516	(2,836,763)	(1.85)
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	70,912,223,905	61,472,105,120	9,440,118,785	15.36
Beban Persediaan	D.3	27,198,396,646	14,842,595,025	12,355,801,621	83.25
Beban Barang dan Jasa	D.4	314,231,819,382	287,431,508,771	26,800,310,611	9.32
Beban Pemeliharaan	D.5	15,709,824,294	13,534,609,712	2,175,214,582	16.07
Beban Perjalanan Dinas	D.6	296,886,436,401	298,382,755,666	(1,496,319,265)	(0.50)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	3,366,919,787	20,455,297,329	(17,088,377,542)	(83.54)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	18,464,479,087	17,268,415,887	1,196,063,200	6.93
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	45,455	(357,355)	402,810	(112.72)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		746,770,144,957	713,386,930,155	33,383,214,802	4.68
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(746,619,521,204)	(713,233,469,639)	(33,386,051,565)	4.68
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		100,159,000	(2,363,025,975)	2,463,184,975	(104.24)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		100,159,000	20,816,000	79,343,000	381.16
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	2,383,841,975	(2,383,841,975)	(100.00)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0.00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3,101,155,352	2,189,640,436	911,514,916	41.63
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3,132,922,288	2,189,640,436	943,281,852	43.08
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		31,766,936	0	31,766,936	0.00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	3,201,314,352	(173,385,539)	3,374,699,891	(1,946.36)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(743,418,206,852)	(713,406,855,178)	(30,011,351,674)	4.21
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa		0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO					
		(743,418,206,852)	(713,406,855,178)	(30,011,351,674)	4.21



Jakarta, 20 April 2017
 Sekretaris Jenderal,

MA'RUF CAHYONO, S.H.,M.H.
 NIP. 19670429 199503 1 001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(FACE REPORT)

**PERBANDINGAN 31 DESEMBER 2016 DAN
31 DESEMBER 2015**

AUDITED

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 AUDITED DAN 2015 AUDITED
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	TA 2016 AUDITED	TA 2015 AUDITED	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	395,087,857,991	387,874,825,520	7,213,032,471	1.86
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(743,418,206,852)	(713,406,855,178)	(30,011,351,674)	4.21
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN	E.3	0	0	0	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		245,222,444,539	(1,931,366,868)	247,153,811,407	(12,796.83)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	0	(1,931,366,868)	1,931,366,868	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	24,878,442	0	24,878,442	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	245,197,566,097	0	245,197,566,097	0.00
Lain-lain		0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	732,458,502,126	722,551,254,517	9,907,247,609	1.37
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		234,262,739,813	7,213,032,471	227,049,707,342	3,147.77
EKUITAS AKHIR	E.8	629,350,597,804	395,087,857,991	234,262,739,813	59.29

Jakarta, 20 April 2017
 Sekretaris Jenderal,



MA'RUF CAHYONO, S.H.,M.H.
 NIP. 19670429 199503 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(*CaLK*)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2016

AUDITED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

**Dasar Hukum
Entitas**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS MPR

A.2.1. Rencana Strategis

Kebijakan Teknis MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Salah satu perubahan penting setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR.

Wewenang MPR adalah:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden tersebut meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Tugas MPR adalah:

- a. Memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Pimpinan MPR.

Sekretariat Jenderal MPR memiliki visi “Terwujudnya

Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Akuntabel dalam melayani MPR”.

Misi Sekretariat Jenderal MPR adalah Memberikan kontribusi nyata dalam memberikan dukungan layanan terhadap MPR RI sebagai kapasitas aparatur negara guna mewujudkan aparatur pemerintah yang baik, melalui:

1. Memberikan Pelayanan yang profesional kepada MPR dan alat kelengkapannya dalam pelaksanaan tugas konstitusional MPR;
2. Memberikan dukungan dibidang Teknis, Administrasi dan Anggaran yang Akuntabel.

Tujuan Sekretariat Jenderal MPR:

1. Tercapainya kualitas dukungan dibidang Layanan kepada MPR dan alat kelengkapan yang profesional;
2. Tercapainya kualitas dukungan Teknis dan Administrasi sesuai Arah Reformasi Birokrasi yang akuntabel; dan
3. Tercapainya kualitas dukungan sarana dan prasarana yang profesional.

Guna mengukur tujuan strategis Sekretariat Jenderal MPR diperlukan sejumlah sasaran strategis, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, dan Alat kelengkapannya;
2. Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal MPR yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang Kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Aparatur; dan
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat kelengkapannya.

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal MPR tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI dan ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2015

Sekretariat Jenderal MPR mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif, kepada MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal MPR menyelenggarakan fungsi:

1. Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat kelengkapan majelis, dan fraksi/kelompok anggota MPR;
2. Membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;
3. Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan redaksi/teknis yuridis dari Rancangan-rancangan/Ketetapan/Keputusan Majelis;
4. Membantu Pimpinan Majelis untuk menyiapkan rancangan anggaran belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa;
5. Menyenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi/kelompok anggota;
6. Menyenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;
7. Menyenggarakan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;

8. Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan kesekretariatan Majelis;
9. Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta pelayanan kesehatan;
10. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Majelis.

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal MPR terdiri dari:

1. Biro Persidangan dan Sosialisasi;
2. Biro Sekretariat Pimpinan;
3. Biro Hubungan Masyarakat;
4. Biro Administrasi dan Pengawasan;
5. Biro Keuangan;
6. Biro Umum;
7. Biro Pengkajian.

A.2.2. Unit Akuntansi Instansi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 14A3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Sekretariat Jenderal MPR RI, maka dibentuk Unit Akuntansi Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI dan Unit Akuntansi Barang Sekretariat Jenderal MPR RI.

Unit Akuntansi Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1);
3. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Unit Akuntansi Barang Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I

(UAPPB-E1);

3. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

Jumlah satuan kerja di lingkup MPR adalah 2 (dua) satuan kerja, yaitu satuan kerja Sekretariat Jenderal (000017) dan satuan kerja Majelis (000021). Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan Laporan Keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 2 (dua) satuan kerja (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Eselon	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	01	Sekretariat Jenderal	1	-	-	-	1
2	02	Majelis	1	-	-	-	1
Jumlah			2	-	-	-	2

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 BASIS AKUNTANSI

*Basis
Akuntansi*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerapkan

basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja Majelis adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah eikuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau bagian lancar TPA

) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

-) Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
-) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa Koleksi Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
-) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. **Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode Garis Lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6 berikut ini;

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

-) Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan..
-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

-) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
-) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
-) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
-) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

-) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

Kewajiban

-) Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016 *Audited* ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah MPR seperti Eselon I dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan serta mencakup atas seluruh transaksi keuangan yang dikelola MPR atau Bagian Anggaran 001 yang berasal dari dana APBN sebesar Rp855.830.897.000,- yang terdiri dari:

- a. Anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp122.263.395.000,- sesuai dengan DIPA-001.01.01.000017/ 2016 tanggal 7 Desember 2015, dan telah direvisi sebanyak 5 (lima) kali, disebabkan karena dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Revisi melalui kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran:

1. Revisi DIPA ke-I, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S.862/WPB.12/2016 tanggal 29 Februari 2016, perihal pergeseran anggaran antar keluaran dalam 1 (satu) satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB);
2. Revisi DIPA ke-II, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-2148/AG/2016 tanggal 1 September 2016, perihal Pergeseran antar Program untuk memenuhi alokasi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih (DJA);
3. Revisi DIPA ke-III, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-2814/WPB.12/2016 tanggal November 2016, perihal pergeseran anggaran antar kegiatan, dalam 1 (satu) satker yang sama, dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB;

Revisi internal melalui kewenangan KPA perihal Pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, yaitu;

1. Revisi DIPA ke-1, tanggal 11 Agustus 2016;
2. Revisi DIPA ke-2, tanggal 7 Desember 2016.

- b. Anggaran satuan kerja Majelis sebesar Rp733.567.502.000,- sesuai dengan DIPA-001.02.1.000021/2016 tanggal 7 Desember 2015, dan telah dilakukan revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali, disebabkan karena adanya

program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Revisi melalui kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran:

1. Revisi DIPA ke-I, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-815/WPB.12/2016 tanggal 25 Februari 2016, perihal Pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) satker yang sama, dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan;
2. Revisi DIPA ke-II, Surat Pengesahan Revisi DIPA No. S-1685/AG/2016 tanggal 20 Juli 2016, perihal APBNP (Pemotongan);
3. Revisi DIPA ke-III, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-2148/AG/2016 tanggal 1 September 2016, perihal Pergeseran antar program untuk memenuhi alokasi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih;
4. Revisi DIPA ke-IV, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-2675/AG/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal tambahan dari BA BUN untuk Dapil.

Revisi internal melalui kewenangan KPA perihal Pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, yaitu;

1. Revisi DIPA ke-1 internal, tanggal 4 Mei 2016,
2. Revisi DIPA ke-2 internal, tanggal 11 Agustus 2016;
3. Revisi DIPA ke-3 internal, tanggal 6 Oktober 2016;
4. Revisi DIPA ke-4 internal, tanggal 7 November 2016;
5. Revisi DIPA ke-5 internal, tanggal 7 Desember 2016;
6. Revisi DIPA ke-6 internal, tanggal 20 Desember 2016;

Perubahan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

URAIAN	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Pegawai	38,517,974,000	78,234,275,000
Belanja Barang	905,815,783,000	768,720,302,000
Belanja Modal	8,969,070,000	8,876,320,000
Jumlah Belanja	953,302,827,000	855,830,897,000

B.1 PENDAPATAN

**Realisasi
Pendapatan
Rp2.422.962.207,-**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah MPR RI untuk periode berakhir 31 Desember 2016 *Audited* adalah sebesar Rp2.422.962.207,-, dengan estimasi pendapatan sebesar Rp125.000.000,-. Seluruh penerimaan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 *Audited* adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan PNBP lainnya TA 2016 Audited

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2016 Audited		
		Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	125.000.000	106.275.844	85,02
4239	Pendapatan Lain-lain	0	2.316.686.363	0,00
Jumlah		125.000.000	2.422.962.207	1938,37

Realisasi PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 *Audited* menunjukkan kenaikan sebesar 131,52 persen dibandingkan 31 Desember 2015 *Audited*. Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut antara lain disebabkan karena adanya kenaikan atas Pendapatan Lain-lain yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL. Perbandingan realisasi pendapatan TA 2016 *Audited* dan 2015 *Audited* tersaji dalam tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 Audited dan 2015 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi TA 2016 Audited	Realisasi TA 2015 Audited	Naik (Turun) %
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	106.275.844	345.413.516	(69,23)
4239	Pendapatan Lain-lain	2.316.686.363	701.144.284	230,42
Jumlah Pendapatan		2.422.962.207	1.046.557.800	131,52

Adapun rincian realisasi Pendapatan per Eselon I untuk TA 2016 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kode	Uraian	TA 2016 (Rp)
1	Eselon I Sekretariat Jenderal	4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	106.275.844
		4239	Pendapatan Lain-lain	8.027.000
			Jumlah	114.302.844
2	Eselon I Majelis	4239	Pendapatan Lain-lain	2.308.659.363
			Jumlah	2.308.659.363
			TOTAL	2.422.962.207

Rincian Pendapatan yang diperoleh MPR sampai dengan 31 Desember 2016 Audited yaitu:

- Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan sebesar Rp106.275.844,- yang bersumber dari:
 - Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp100.159.000,- dari penjualan aset tetap yang sudah tidak digunakan.
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.116.844,- dari sewa atas rumah dinas pegawai di Komplek Cilandak dan Widya Chandra.
- Pendapatan Lain-lain sebesar Rp2.316.686.363,- berupa Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker Majelis yang berasal dari:
 - Setoran pengembalian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015 sebesar Rp2.177.757.436,- , yang terdiri atas:

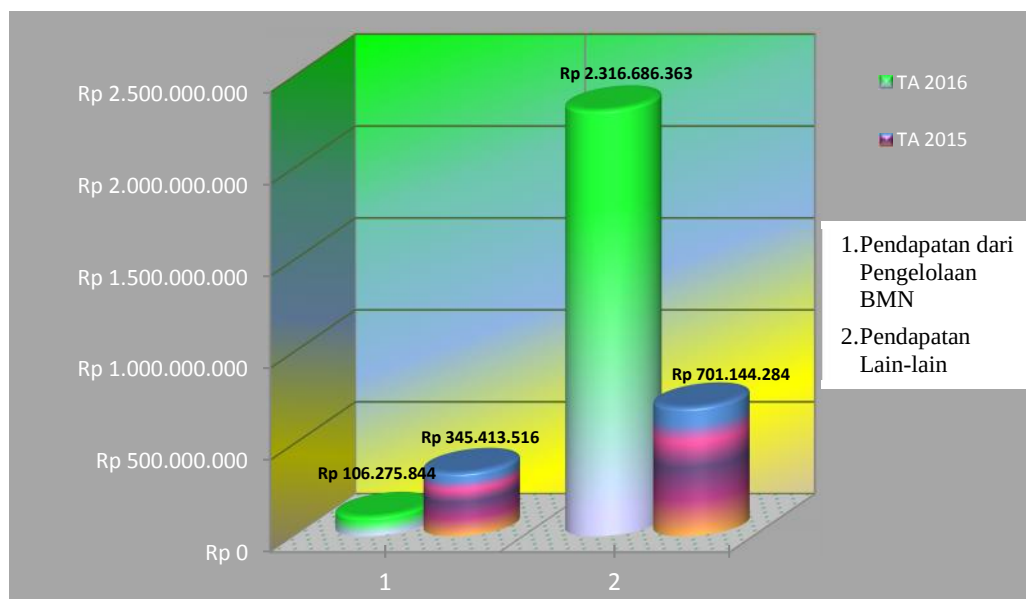
No	Uraian	Nilai Pengembalian
1	Setoran Pengembalian Kas Lainnya dan Setara Kas satker 000017 (Setjen)	8.027.000
2	Setoran Pengembalian Kas Lainnya dan Setara Kas satker 000021 (Majelis)	2.169.730.436
	Total	2.177.757.436

- Setoran pengembalian perjalanan dinas/honor kegiatan Anggota TA 2015 sesuai yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp138.928.927,-.

Secara grafik, perbandingan realisasi Pendapatan menurut ikhtisar MAP (Mata Anggaran Pengeluaran) untuk TA 2016 dan 2015 Audited adalah

sebagai berikut:

**Grafik 1. Komposisi Realisasi Pendapatan menurut ikhtisar MAP
TA 2016 Audited dan 2015 Audited**



B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara
Rp734.881.464.333,-

Realisasi belanja MPR untuk periode yang berakhir TA 2016 Audited adalah sebesar Rp734.881.464.333,- atau sebesar 85,87 persen dari anggarannya sebesar Rp855.830.897.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran dan Realisasi Belanja dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Audited menurut program tersaji pada Tabel 11:

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 Audited menurut Program

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi TA 2016 Audited	% Realisasi
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	86.179.447.000	75.159.056.607	87,21
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	36.083.948.000	34.579.001.946	95,83
06	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	733.567.502.000	625.143.405.780	85,22
Jumlah		855.830.897.000	734.881.464.333	85,87

Dari tiga program tersebut, rincian realisasi belanja menurut kegiatan hingga 31 Desember 2016 Audited dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12
Rincian Realisasi Belanja menurut Kegiatan TA 2016 Audited (Neto)

(Dalam Rupiah)

Prog	Keg	Komp	Uraian	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam Rupiah)	% Realisasi Anggaran
01			PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MPR	86.179.447.000	75.159.056.607	87,21
	1001		Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	14.657.542.000	12.050.228.109	82,21
		001	Dokumen Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	9.218.129.000	7.326.641.577	79,48
		994	Layanan Perkantoran	5.439.413.000	4.723.586.532	86,84
	1002		Penyelenggaraan Kehumasan	2.330.066.000	2.026.059.544	86,95
		001	Layanan Kehumasan MPR dan Sekretariat Jenderal	1.284.346.000	1.125.439.544	87,63
		994	Layanan Perkantoran	1.045.720.000	900.620.000	86,12
	1003		Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	62.847.435.000	56.730.643.719	90,27
		001	Dokumen Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	893.380.000	870.658.592	97,46
		994	Layanan Perkantoran	61.954.055.000	55.859.985.127	90,16
	1004		Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya	660.720.000	600.195.300	90,84
		001	Layanan Sidang MPR dan Alat Kelengkapannya	660.720.000	600.195.300	90,84
	1005		Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Pimpinan	5.418.344.000	3.511.830.560	64,81
		001	Layanan Tugas Kesekretariatan Pimpinan MPR	4.352.943.000	2.506.433.200	57,58
		994	Layanan Perkantoran	1.065.401.000	1.005.397.360	94,37
	1006		Dukungan Pengkajian Kemajelis	265.340.000	240.099.375	90,49
		001	Laporan Hasil Kajian	265.340.000	240.099.375	90,49
02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MPR	36.083.948.000	34.579.001.946	95,83
	1007		Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	36.083.948.000	34.579.001.946	95,83
		001	Dukungan Pengelolaan Administrasi Barang Kekayaan Milik Negara	1.962.780.000	1.683.431.490	85,77
		994	Layanan Perkantoran	27.115.618.000	26.060.170.926	96,11
		995	Kendaraan Bermotor	2.814.840.000	2.801.266.000	99,52
		996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	927.190.000	926.032.810	99,88
		997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.263.520.000	3.108.100.720	95,24
06			PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS KONSTITUSIONAL MPR DAN ALAT KELENGKAPANNYA	733.567.502.000	625.143.405.780	85,22
	1008		Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	43.731.952.000	37.014.860.382	84,64
		001	Dukungan Kegiatan Pimpinan MPR	43.731.952.000	37.014.860.382	84,64
	5001		Pelaksanaan Kegiatan Publikasi/Pelputan	61.304.711.000	43.268.482.005	70,58
		001	Publikasi Kegiatan MPR	61.304.711.000	43.268.482.005	70,58
	5002		Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	388.004.292.000	335.453.936.947	86,46
		001	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	388.004.292.000	335.453.936.947	86,46
	5003		Pengkajian Kemajelis	193.645.721.000	168.211.788.731	86,87
		001	Laporan Hasil Kajian dan Aspirasi Masyarakat	167.523.821.000	144.106.814.843	86,02
		002	Rekomendasi Kajian	26.121.900.000	24.104.973.888	92,28

Lanjutan komponen belanja 06.5003.002					
5004		Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	31.149.500.000	27.559.258.924	88,47
	994	Layanan Perkantoran	31.149.500.000	27.559.258.924	88,47
5728		Penganggaran MPR RI	15.731.326.000	13.635.078.791	86,67
	001	Dokumen Penganggaran MPR	15.731.326.000	13.635.078.791	86,67

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

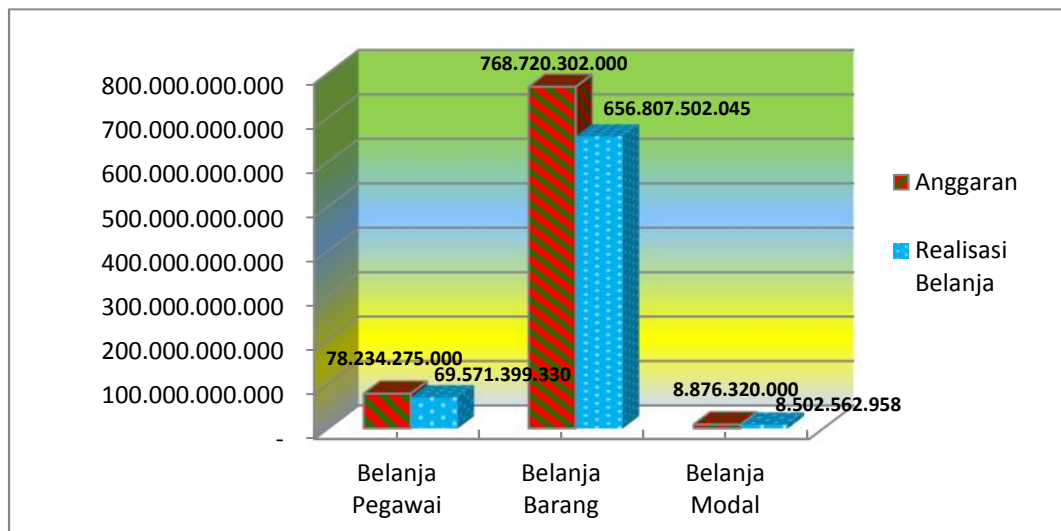
Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2016 Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 78.234.275.000	Rp 69.718.389.109	89,11
Belanja Barang	Rp 768.720.302.000	Rp 671.031.189.109	87,29
Belanja Modal	Rp 8.876.320.000	Rp 8.502.562.958	95,79
Total Belanja Bruto	Rp 855.830.897.000	Rp 749.252.141.176	87,55
Pengembalian Belanja Pegawai		Rp 146.989.779	
Pengembalian Belanja Barang		Rp 14.223.687.064	
Total Belanja Neto	Rp 855.830.897.000	Rp 734.881.464.333	85,87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 2 berikut ini:

Grafik 2: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 Audited (Neto)



Dibandingkan dengan posisi TA 2015 Audited, realisasi Belanja untuk periode berakhir TA 2016 Audited ini naik sebesar 1,56 persen. Perbandingan realisasi belanja antara periode yang berakhir TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited tersaji pada tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi		Naik (Turun) %
		TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	
51	Belanja Pegawai	Rp 69.571.399.330	Rp 29.784.545.620	133,58
52	Belanja Barang	Rp 656.807.502.045	Rp 670.382.963.710	(2,03)
53	Belanja Modal	Rp 8.502.562.958	Rp 23.430.302.987	(63,71)
Jumlah		Rp 734.881.464.333	Rp 723.597.812.317	1,56

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai
Rp69.571.399.330,-

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode berakhir TA 2016 Audited dan 2015 Audited masing-masing adalah sebesar Rp69.571.399.330,- dan Rp29.784.545.620,-, Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 Audited (Neto)

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Pegawai	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi Belanja (dalam Rupiah)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.864.997.000	12.893.810.660	93,00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	443.000	209.579	47,31
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.386.497.000	844.825.226	60,93
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	285.220.000	256.171.749	89,82
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.391.810.000	1.172.514.766	84,24
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	58.310.000	32.000.000	54,88
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	497.350.000	151.799.231	30,52
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	834.278.000	740.784.180	88,79
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.550.240.000	1.975.401.000	77,46
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	48.876.000	0	0,00
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	593.320.000	537.905.000	90,66
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	343.392.000	329.280.000	95,89
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	6.000	1.680	28,00
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	34.338.000	30.576.000	89,04
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	13.735.000	9.828.000	71,55
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	1.138.200.000	1.056.900.000	92,86
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	226.001.000	187.280.128	82,87
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	17.380.000	15.642.720	90,00
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	966.048.000	951.408.000	98,48
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	6.328.440.000	5.154.457.500	81,45
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara	140.000.000	130.000.000	92,86
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	462.000.000	440.000.000	95,24
511337	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	90.000.000	0	0,00
512211	Belanja Uang Lembur	100.000.000	54.869.000	54,87
512411	Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	46.648.901.000	42.605.734.911	91,33
512412	Belanja Pegawai Transito	214.493.000	0	0,00
Jumlah		78.234.275.000	69.571.399.330	88,93

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara periode yang berakhir TA 2016 Audited dan 2015 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 Audited dan 2015 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Pegawai	Realisasi		Naik/ (Turun)%
		TA 2016	TA 2015 Audited	
1	2	3	4	6=(3-4)/4x100
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12.895.548.900	11.587.905.260	11,28
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210.964	312.493	(32,49)
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	848.421.740	814.940.572	4,11
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	256.413.390	252.114.642	1,71
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.174.515.000	1.198.745.000	(2,02)
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.000.000	30.620.000	4,51
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	151.799.231	272.795.500	(44,35)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	742.305.000	744.530.160	(0,30)
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.975.401.000	1.947.428.000	1,44
511147	Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	0	tidak terdapat realisasi
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	538.090.000	518.815.000	3,72
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	329.280.000	305.760.000	7,69
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	1.680	2.000	(16,00)
511321	Belanja Tunj.Suami/Istri Pejabat Negara	30.576.000	30.576.000	0,00
511322	Belanja Tunj.Anak Pejabat Negara	9.828.000	9.828.000	0,00
511323	Belanja Tunj.Struktural Pejabat Negara	1.056.900.000	1.056.900.000	0,00
511324	Belanja Tunj.PPh Pejabat Negara	187.280.128	171.998.886	8,88
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	15.642.720	15.786.360	(0,91)
511331	Belanja Tunj.Komunikasi Intensif Pejabat Negara	951.408.000	878.208.000	8,34
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	5.176.770.000	1.177.200.000	339,75
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara	130.000.000	130.000.000	0,00
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	440.000.000	330.000.000	33,33
511337	Belanja Tunj.Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	0	0	tidak terdapat realisasi
512211	Belanja Uang Lembur	54.869.000	89.129.000	(38,44)
512411	Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	42.721.128.356	8.229.500.000	419,12
512412	Belanja Pegawai Transito	0	0	tidak terdapat realisasi
Realisasi Belanja Bruto		69.718.389.109	29.793.094.873	134,01
511111	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	(1.738.240)	0	0,00
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(1.385)	(133.197)	(98,96)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	(3.596.514)	0	0,00
511122	Pengembalian Belanja Tunj.Anak PNS	(241.641)	(252.808)	(4,42)
511123	Pengembalian Belanja Tunj.Struktural Pejabat Negara	(2.000.234)	0	0,00
511125	Pengembalian Tunj.PPh PNS	0	(24.648)	(100,00)
511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	(1.520.820)	(279.040)	445,02
511151	Pengembalian Belanja Tunj.Umum PNS	(185.000)	(1.850.000)	(90,00)
511319	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	0	(560)	(100,00)
511332	Pengembalian Uang Kehormatan Pejabat Negara	(22.312.500)	(3.672.000)	507,64
512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	(115.393.445)	(2.337.000)	4.837,67
Pengembalian Belanja		(146.989.779)	(8.549.253)	1.619,33
Realisasi Belanja Neto		69.571.399.330	29.784.545.620	133,58

Ini berarti terjadi kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp39.786.853.710,- atau sebesar 133,58 persen bila dibandingkan realisasi pada TA 2015 Audited . Kenaikan ini disebabkan antara lain karena adanya pemberian gaji 14 untuk pegawai PNS dan CPNS dan dimulainya pembayaran Tunjangan Kinerja di tahun ini.

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp656.807.502.045,-

Realisasi Belanja Barang antara periode berakhir TA 2016 Audited dan 2015 Audited adalah masing-masing sebesar Rp656.807.502.045,- dan Rp670.382.963.710,-.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2016 Audited disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2016 Audited (Neto)

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Barang	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi Belanja (Dalam Rupiah)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6.369.120.000	6.186.727.434	97,14
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	19.800.000	16.155.000	81,59
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.018.270.000	923.889.000	90,73
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13.536.001.000	12.365.367.206	91,35
521211	Belanja Bahan	14.584.702.000	12.598.241.305	86,38
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	61.045.563.000	52.935.185.000	86,71
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	180.271.754.000	154.151.643.630	85,51
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.471.359.000	26.597.745.654	87,29
522111	Belanja Langganan Listrik	2.868.000.000	2.776.895.553	96,82
522112	Belanja Langganan Telepon	696.000.000	658.666.478	94,64
522113	Belanja Langganan Air	336.000.000	330.534.462	98,37
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	28.446.000	0	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	832.500.000	430.899.500	51,76
522141	Belanja Sewa	12.531.846.000	9.456.074.523	75,46
522151	Belanja Jasa Profesi	75.650.532.000	64.235.666.440	84,91
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.228.795.000	1.006.968.488	81,95
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.662.832.000	5.651.180.438	99,79
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.397.139.000	1.381.486.480	98,88
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.591.826.000	7.319.549.053	96,41
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.042.600.000	898.190.000	86,15
524111	Belanja Perjalanan Biasa	170.085.214.000	129.988.750.952	76,43
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.956.040.000	1.529.180.000	78,18
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.017.442.000	121.540.969.050	92,77
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.590.700.000	5.602.179.000	85,00
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	434.686.000	37.703.880	8,67
524219	Belanja Perjalanan Lainnya-LN	41.453.135.000	38.187.653.519	92,12
Jumlah		768.720.302.000	656.807.502.045	85,44

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.575.461.665,- atau sebesar 2,03 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2015 Audited, hal ini disebabkan karena adanya perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN-P) yang mengakibatkan penurunan pagu anggaran belanja barang juga belanja perjalanan dinas pada TA 2016 Audited.

Perbandingan realisasi belanja barang TA 2016 Audited dan 2015 Audited dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 Audited dan 2015 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Barang	Realisasi		Naik/ (Turun) %
		TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	
1	2	3	4	5=(3-4)/4x100
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6.197.794.734	4.374.268.994	41,69
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	16.155.000	16.920.000	(4,52)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	923.889.000	884.191.000	4,49
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	12.365.367.206	11.451.422.040	7,98
521211	Belanja Bahan	12.598.991.305	43.576.168.841	(71,09)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53.762.991.000	74.223.360.200	(27,57)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	154.162.085.375	150.276.154.826	2,59
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26.597.745.654	4.413.241.087	502,68
522111	Belanja Langganan Listrik	2.776.895.553	2.901.934.996	(4,31)
522112	Belanja Langganan Telepon	658.666.478	685.634.593	(3,93)
522113	Belanja Langganan Air	330.534.462	387.814.412	(14,77)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	4.845.655	(100,00)
522131	Belanja Jasa Konsultan	430.899.500	462.650.000	(6,86)
522141	Belanja Sewa	9.456.074.523	6.302.316.040	50,04
522151	Belanja Jasa Profesi	64.816.111.440	59.480.398.000	8,97
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.006.968.488	1.180.147.657	(14,67)
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.651.180.438	4.793.954.252	17,88
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.381.486.480	1.052.153.944	31,30
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.319.549.053	6.641.935.382	10,20
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	898.190.000	842.182.000	6,65
524111	Belanja Perjalanan Biasa	139.802.515.393	153.359.349.507	(8,84)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.529.180.000	3.128.990.000	(51,13)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	121.573.969.050	120.505.032.472	0,89
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.602.179.000	7.911.746.682	(29,19)
524211	Belanja Perjalanan Biasa -Luar Negeri	37.703.880	337.024.808	(88,81)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya LN	41.134.066.097	23.888.262.891	72,19
Realisasi Belanja Bruto		671.031.189.109	683.082.100.279	(1,76)
521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	(11.067.300)	(240.000)	4.511,38

	Lanjutan Pengembalian MAK 521111			
521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	(30.470.000)	(100,00)
521211	Pengembalian Belanja Bahan	(750.000)	0	0,00
521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	(827.806.000)	(237.085.875)	249,16
521219	Pengembalian Belanja Non Operasional Lainnya	(10.441.745)	0	0,00
522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	(580.445.000)	(1.683.690.000)	(65,53)
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	(9.813.764.441)	(8.973.869.606)	9,36
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(33.000.000)	(742.500.000)	(95,56)
524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya- Luar Negeri	(2.946.412.578)	(1.031.281.088)	185,70
Jumlah Pengembalian Belanja		(14.223.687.064)	(12.699.136.569)	12,01
Realisasi Belanja Neto		656.807.502.045	670.382.963.710	(2,03)

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp8.502.562.958,-

Realisasi Belanja Modal untuk TA 2016 Audited dan 2015 Audited adalah masing-masing sebesar Rp8.502.562.958,- dan Rp23.430.302.987,-.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2016 Audited disajikan dalam Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2016 Audited (NETO)

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Modal	Anggaran	Realisasi Belanja (Neto)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.956.220.000	6.746.936.530	96,99
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	100.000.000	96.497.500	96,50
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.820.100.000	1.659.128.928	91,16
Jumlah		8.876.320.000	8.502.562.958	95,79

Realisasi Belanja Modal untuk TA 2016 Audited mengalami penurunan sebesar Rp14.927.740.033,- atau sebesar 63,71 persen dibanding Realisasi Belanja Modal TA 2015 Audited .

Perbandingan realisasi belanja modal TA 2016 Audited dan 2015 Audited dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 Audited dan 2015 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Modal	Realisasi		Naik/(Turun) %
		TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	
1	2	3	4	5
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.746.936.530	23.231.507.027	(70,96)
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	96.497.500	32.780.000	194,38
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.659.128.928	66.673.860	2.388,42
536111	Belanja Modal Lainnya	0	99.342.100	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto		8.502.562.958	23.430.302.991	(63,71)
Pengembalian Belanja		0	0	0,00
Realisasi Belanja Neto		8.502.562.958	23.430.302.991	(63,71)

Pada akhir periode TA 2016 Audited dan 2015 Audited tidak terdapat pengembalian belanja modal sehingga realisasi belanja modal neto besarnya sama dengan realisasi belanja modal bruto.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp20.018.539.412,-.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* adalah masing-masing sebesar **Rp20.018.539.412,-** dan **Rp20.972.862.776,-**.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Aset Lancar per 31 Des 2016 *Audited* dan per 31 Des 2015 *Audited*

No.	Aset Lancar	31 Des 2016 <i>Audited</i>	31 Des 2015 <i>Audited</i>
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 4,636,093,012	Rp 7,454,782,424
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 7,638,247,801	Rp 3,855,800,883
3	Piutang Bukan Pajak	Rp 9,090,909	Rp -
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	Rp (45,455)	Rp -
5	Persediaan	Rp 7,735,153,145	Rp 9,662,279,469
	Jumlah	Rp 20,018,539,412	Rp 20,972,862,776

C. 1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas di Bendahara
Pengeluaran**
Rp4.636.093.012,-.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran MPR RI per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* adalah masing-masing sebesar **Rp4.636.093.012,-** dan **Rp7.454.782.424,-**. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel 22.

Tabel 22
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per-Eselon I

Kode	Uraian eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 1,330,966,920	Rp 12,390,781	Rp 1,318,576,139
2	MAJELIS	Rp 3,305,126,092	Rp 7,442,391,643	Rp (4,137,265,551)
Total		Rp 4,636,093,012	Rp 7,454,782,424	Rp (2,818,689,412)

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited
Rekening Bank	Rp -	Rp -
Uang Tunai	Rp 4,636,093,012	Rp 7,454,782,424
	Rp 4,636,093,012	Rp 7,454,782,424

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 Audited tersebut telah disetor ke rekening Kas Negara dengan rincian pada tabel berikut:

No	Tanggal Setor	NTPN	Bank	Jumlah
1	6 Januari 2017	13BC63LGDAGSBDD9	Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Rp 3,305,126,092
2	6 Januari 2017	2DEB48PPE40L2DD8	Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Rp 1,330,966,920
Total				Rp 4,636,093,012

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran.

C. 1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp7.638.247.801,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp7.638.247.801,-** dan **Rp3.855.800.883,-**. Kas Lainnya merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Des 2016 Audited dan 31 Des 2015 Audited

No.	Keterangan	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited
1	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	Rp 7,638,247,801	Rp 3,855,800,883
	Jumlah	Rp 7,638,247,801	Rp 3,855,800,883

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Kas Lainnya dan setara Kas per-Eselon I

No	Uraian eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 2,461,687,831	Rp 247,542,891	Rp 2,214,144,940
2	MAJELIS	Rp 5,176,559,970	Rp 3,608,257,992	Rp 1,568,301,978
	Total	Rp 7,638,247,801	Rp 3,855,800,883	Rp 3,782,446,918

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan pajak
Rp9.090.909,-

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp9.090.909,-** dan **Rp0,-** yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 Audited dan 2015 disajikan pada tabel 26.

Tabel 26
Rincian Piutang Bukan Pajak per-Eselon I

Kode	Uraian eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 9,090,909	Rp -	Rp 9,090,909
2	MAJELIS	0	0	0
	Total	Rp 9,090,909	Rp -	Rp 9,090,909

Sedangkan mutasi Piutang PNBPN pada tahun anggaran 2016 Audited adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015 Audited	Rp0
Mutasi tambah:	
- Sewa ruang koperasi TA 2016 belum terbayar	Rp9,090,909
Mutasi kurang:	
-	Rp0
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	9,090,909

Mutasi penambahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp9.090.909,- merupakan pendapatan sewa ruang koperasi tahun 2016 *Audited* yang belum terbayar s.d. tanggal neraca. Sewa ruang koperasi dibayar pada tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan kontrak nomor 2/01/2017 dan 2/01/kop/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Perjajian Sewa Ruangan untuk Koperasi di Gedung MPR Kompleks MPR/DPR Jalan Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI. Pendapatan sewa ruang koperasi selama 2 tahun (1 Januari 2016 *Audited* s.d. 31 Desember 2017) tersebut telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp18.181.818,- dengan nomor NTPN 8D95079431O0L9CP.

C.1.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
(Rp45.455,-)*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* adalah masing-masing sebesar **(Rp45.455,-)** dan **Rp0,-** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 27
Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	9,090,909	0,5%	45,455
2	Kurang Lancar	-	-	10%	-
3	Diragukan	-	-	50%	-
4	Macet	-	-	100%	-
Total		1	9,090,909		45,455

Tabel 28
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per-Eselon I

Kode	Uraian eselon I	31 Des 2016 <i>Audited</i>	31 Des 2015 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 45,455	Rp -	Rp 45,455
2	MAJELIS	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 45,455	Rp -	Rp 45,455

C.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp7.735.153.145,-

Nilai persediaan per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp7.735.153.145,-** dan **Rp9.662.279.469,-**. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per Eselon dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29
Rincian Persediaan per-Eselon I

No	Uraian eselon I	31 Des 2016 <i>Audited</i>	31 Des 2015 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 2,762,796,621	Rp 2,806,946,562	Rp (44,149,941)
2	MAJELIS	Rp 4,972,356,524	Rp 6,855,332,907	Rp (1,882,976,383)
Total		Rp 7,735,153,145	Rp 9,662,279,469	Rp (1,927,126,324)

Tabel 30
Rincian Persediaan per 31 Des 2016 *Audited* dan 31 Des 2015 *Audited*

Kode Akun	Uraian	31 Des 2016 <i>Audited</i>	31 Des 2015 <i>Audited</i>
117111	Barang Konsumsi	Rp 7,052,134,378	Rp 5,513,569,322
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp 58,807,961	Rp 307,834,352
117128	Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat	Rp 254,948,980	Rp 3,471,180,427
117131	Bahan Baku	Rp 11,807,000	Rp 14,055,000
117199	Persediaan Lainnya	Rp 357,454,826	Rp 355,640,368
Saldo Persediaan		Rp 7,735,153,145	Rp 9,662,279,469

C. 2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp608.001.741.491,-

Saldo nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp608.001.741.491,-** dan **Rp371.653.353.932,-**. Saldo Aset Tetap tersebut merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional MPR RI.

Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2016 *Audited* disajikan berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel Tahun Anggaran 2016 *Audited* tingkat Unit Akuntansi Pengguna

Barang (UAPB).

Perbandingan antara Aset Tetap di Neraca dengan Laporan hasil SIMAK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Des 2016 Audited

Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK-BMN	Selisih
Tanah	Rp 343,728,232,605	Rp 343,728,232,605	0
Peralatan dan Mesin	Rp 139,263,126,534	Rp 139,263,126,534	0
Gedung dan Bangunan	Rp 203,328,496,465	Rp 203,328,496,465	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	0
Aset Tetap Lainnya	Rp 60,618,883,915	Rp 60,618,883,915	0
Jumlah	Rp 760,585,017,219	Rp 760,585,017,219	0
Akumulasi Penyusutan	Rp (152,583,275,728)	Rp (152,583,275,728)	0
Nilai Buku	Rp 608,001,741,491	Rp 608,001,741,491	0

Perbandingan rincian Aset Tetap MPR RI per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32
Perbandingan Aset Tetap per 31 Des 2016 Audited dan 31 Des 2015 Audited

No	Uraian	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	Rp 343,728,232,605	Rp 97,527,032,605	Rp 246,201,200,000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 139,263,126,534	Rp 133,823,058,674	Rp 5,440,067,860
3	Gedung dan Bangunan	Rp 203,328,496,465	Rp 202,293,300,154	Rp 1,035,196,311
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	0
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 60,618,883,915	Rp 59,891,063,198	Rp 727,820,717
	Jumlah	Rp 760,585,017,219	Rp 507,180,732,331	Rp 253,404,284,888
	Akumulasi Penyusutan	Rp (152,583,275,728)	Rp (135,527,378,399)	Rp (17,055,897,329)
	Nilai Buku Aset Tetap	Rp 608,001,741,491	Rp 371,653,353,932	Rp 236,348,387,559

Rincian Aset Tetap per eselon I disajikan pada tabel 33.

Tabel 33
Rincian Aset Tetap per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 602,216,385,857	Rp 364,995,897,224	Rp 237,220,488,633
Majelis	Rp 5,785,355,634	Rp 6,657,456,708	Rp (872,101,074)
	Rp 608,001,741,491	Rp 371,653,353,932	Rp 236,348,387,559

Mutasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2016 *Audited* adalah sebagai berikut:

Nilai Buku per 31 Desember 2015 Audited	Rp 507,180,732,331
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp 6,639,067,230
- Pengembangan	Rp 1,127,926,311
- Penambahan saldo awal	Rp 246,208,590,600
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 720,430,117
Mutasi kurang:	
- Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp (1,291,729,370)
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 760,585,017,219
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(Rp152,583,275,278)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp608,001,741,941

C. 2.1 Tanah

Tanah
Rp343.728.232.605,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki MPR per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp343.728.232.605,-** dan **Rp97.527.032.605,-**.

Rincian Aset secara detail per 31 Desember 2016 *Audited* adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Rincian Tanah

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	293 m2	Jl. Nusa Indah, Cilandak	Rp 1,019,342,605
2	271 m2	Jl. Melati, Cilandak	Rp 848,230,000
3	419 m2	Jl. Anggrek, Cilandak	Rp 1,311,470,000
4	1,647 m2	Jl. Cimalaya, Bandung	Rp 14,444,190,000
5	980 m2	Kampung Pecandra, Senayan	Rp 7,938,000,000
6	289 m2	Jl. Mawar, Cilandak	Rp 1,118,430,000
7	420 m2	Jl. Widya Candra III	Rp 3,402,000,000
8	14,404 m2	Komplek MPR RI, Cilandak Barat	Rp 45,084,520,000
9	125 m2	Jl. Anggrek, Cilandak Barat	Rp 391,250,000
10	2,760 m2	Jl. Widya Candra III	Rp 21,969,600,000
11	7,646 m2	Jl. Asia Afrika no.65, Kel. Braga, Bandung	Rp 246,201,200,000
	29,254 m2		Rp 343,728,232,605

Rincian tanah per eselon I dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35
Rincian Tanah per-Eselon I

Eselon I	per 31 Des 2016 Audited	per 31 Des 2015 Audited	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 343,728,232,605	Rp 97,527,032,605	246,201,200,000
Majelis	0	0	0
Jumlah	Rp 343,728,232,605	Rp 97,527,032,605	246,201,200,000

Kenaikan nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015 Audited	Rp 97,527,032,605
Mutasi tambah:	
- Pencatatan Saldo Awal	Rp 246,201,200,000
Mutasi kurang:	
-	Rp -
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 343,728,232,605
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp0
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp343,728,232,605

Transaksi mutasi penambahan Tanah senilai Rp 246.201.200.000,- berupa pencatatan aset Tanah sebagai saldo awal, semula dicatat sebagai Aset Bersejarah sebesar Rp246.201.200.000,-.

C. 2.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp139.263.126.534,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Neraca per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing sebesar **Rp139.263.126.534,-** dan **Rp133.823.058.674,-**.

Tabel 36
Rincian Peralatan dan Mesin per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2015 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 119,900,410,625	Rp 114,460,342,765	Rp 5,440,067,860
Majelis	Rp 19,362,715,909	Rp 19,362,715,909	Rp -
	Rp 139,263,126,534	Rp 133,823,058,674	Rp 5,440,067,860

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015 Audited	Rp 133,823,058,674
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp 6,639,067,230
- Pengembangan	Rp 92,730,000
Mutasi kurang:	
- Reklas dari Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp (1,291,729,370)
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 139,263,126,534
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(Rp108,669,976,001)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp30,593,150,533

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin senilai Rp5.440.067.860,- berupa:

1. Mutasi tambah karena pembelian sebesar Rp6.639.067.230,- berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Besar Darat	Rp 4,682,700
2	Alat Bantu	Rp 15,950,000
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 2,708,536,000
4	Alat Bengkel Bermesin	Rp 41,217,000
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 7,183,000
6	Alat Kantor	Rp 258,011,000
7	Alat Rumah Tangga	Rp 852,058,320
8	Alat Studio	Rp 14,597,000
9	Alat Komunikasi	Rp 222,640,000
10	Alat Kedokteran	Rp 658,614,000
11	Alat Khusus Kepolisian	Rp 30,108,400
12	Komputer Unit	Rp 889,263,810
13	Peralatan Komputer	Rp 931,674,000
14	Unit Peralatan Proses/Produksi	Rp 4,532,000
Jumlah		Rp 6,639,067,230

2. Mutasi tambah karena pengembangan nilai aset sebesar Rp92.730.000,- berupa pengembangan Alat Angkutan Darat Bermotor.
3. Mutasi kurang sebesar Rp1.291.729.370,- karena reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 517,621,000
2	Alat Kantor	Rp 107,762,000
3	Alat Rumah Tangga	Rp 66,093,000
4	Alat Komunikasi	Rp 99,074,500
5	Komputer Unit	Rp 296,298,000
6	Peralatan Komputer	Rp 204,880,870
Jumlah		Rp 1,291,729,370

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 *Audited* disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini. Rincian penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

C. 2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp203.328.496.465,-

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp203.328.496.465,-** dan **Rp202.293.300.154,-**.

Tabel 37
Rincian Gedung dan Bangunan per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 203,328,496,465	Rp 202,293,300,154	Rp 1,035,196,311
Majelis	0	0	0
	Rp 203,328,496,465	Rp 202,293,300,154	Rp 1,035,196,311

Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2015 Audited	Rp 202,293,300,154
Mutasi tambah:	
- Pengembangan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 1,035,196,311
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 203,328,496,465
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Audited	Rp (41,064,822,659)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp 162,263,673,806

Transaksi mutasi penambahan Gedung dan Bangunan yang merupakan transaksi pengembangan senilai Rp1.035.196.311,- berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 855,370,236
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 179,826,075
Jumlah		Rp 1,035,196,311

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini. Rincian penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

C. 2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan
Rp13.646.277.700,-

Nilai Jalan, Irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp13.646.277.700,-** dan **Rp13.646.277.700,-**.

Tabel 38
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	Rp -
Majelis	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	Rp -

Transaksi penambahan dan pengurangan Rincian Jalan, Irigasi, dan jaringan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2015 Audited	Rp 13,646,277,700
Mutasi tambah:	-
-	-
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 13,646,277,700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp (2,848,477,068)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp 10,797,800,632

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Rincian penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp60.618.883.915,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp60.618.883.915,- dan Rp59.891.063.198,-**.

Tabel 39
Rincian Aset Tetap Lainnya per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 57,152,105,839	Rp 56,424,285,122	Rp 727,820,717
Majelis	Rp 3,466,778,076	Rp 3,466,778,076	Rp -
	Rp 60,618,883,915	Rp 59,891,063,198	Rp 727,820,717

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2015 Audited	Rp 59,891,063,198
Mutasi tambah:	
- Penyelesaian pembangunan langsung	Rp 720,430,117
- Pencatatan buku menjadi saldo awal di TA 2016	Rp 7,390,600
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 60,618,883,915
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2016	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp 60,618,883,915

Transaksi mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa :

- Penyelesaian pembangunan langsung Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebesar Rp720.430.117,-.
- Mencatat buku-buku yang belum tercatat menjadi saldo awal pada tahun 2016 Audited senilai Rp7.390.600,-.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini. Rincian penyusutan Aset Tetap Lainnya disajikan Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp152.583.275.728,-**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp152.583.275.728,-** dan **Rp135.527.378.399,-** .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 Audited tersaji pada Tabel 40.

Tabel 40
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 139,263,126,534	Rp 108,669,976,001	Rp 30,593,150,533
2	Gedung dan Bangunan	Rp 203,328,496,465	Rp 41,064,822,659	Rp 162,263,673,806
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 13,646,277,700	Rp 2,848,477,068	Rp 10,797,800,632
	Akumulasi Penyusutan	Rp 356,237,900,699	Rp 152,583,275,728	Rp 203,654,624,971

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 *Audited* disajikan pada Lampiran A1 Laporan keuangan ini.

C. 3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp10.929.090.544,-

Nilai buku Aset Lainnya menurut Neraca per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp10.929.090.544,-** dan **Rp12.056.967.435,-**.

Rincian Aset Lainnya per eselon I disajikan pada tabel 41.

Tabel 41
Rincian Aset Lainnya per-Eselon I

Eselon I	31 Desember 2016 Audited	31 Desember 2015 Audited	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 10,858,993,924	Rp 11,710,649,045	Rp (851,655,121)
Majelis	Rp 70,096,620	Rp 346,318,390	Rp (276,221,770)
	Rp 10,929,090,544	Rp 12,056,967,435	Rp (1,127,876,891)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Des 2015 Audited (Nilai perolehan)	Rp 13,340,539,940
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari peralatan dan mesin menjadi aset lainnya	Rp 1,291,729,370
Mutasi kurang:	
- Penghapusan BMN melalui proses lelang	Rp (1,291,729,370)
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 13,340,539,940
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp (2,411,449,396)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp 10,929,090,544

C. 3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp1.246.944.540,-

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud termasuk dalam aset lainnya menurut Neraca per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* adalah sebesar **Rp1.246.944.540,-** dan **Rp1.246.944.540,-**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset tak Berwujud per 31 Desember 2016 *Audited* adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 1,189,222,920
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 57,721,620
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp 1,246,944,540
Penyusutan s.d. 31 Desember 2016		Rp (1,127,822,295)
Jumlah Nilai Buku per 31 Desember 2016		Rp 119,122,245

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon-1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 43
Rincian Aset Tak Berwujud per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 900,626,150	Rp 900,626,150	Rp -
Majelis	Rp 346,318,390	Rp 346,318,390	Rp -
	Rp 1,246,944,540	Rp 1,246,944,540	Rp -

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Des 2015 Audited (Nilai perolehan)	Rp 1,246,944,540
Mutasi tambah:	
-	Rp -
Mutasi kurang:	
-	Rp -
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 1,246,944,540
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp (1,127,822,295)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp 119,122,245

C. 3.2. Aset Lain-lain/Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Aset Lain-lain
Rp12.093.595.400,-

Nilai perolehan Aset Lain-lain/Aset Tetap Yang Tidak Digunakan menurut Neraca per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp12.093.595.400,-** dan **Rp12.093.595.400,-**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Setjen MPR RI.

Tabel 44
Rincian Aset Lain-lain per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 12,093,595,400	Rp 12,093,595,400	Rp -
Majelis	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 12,093,595,400	Rp 12,093,595,400	Rp -

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2015 Audited	Rp 12,093,595,400
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari peralatan dan mesin menjadi aset lainnya	Rp 1,291,729,370
Mutasi kurang:	
- Penghapusan BMN melalui proses lelang	Rp (1,291,729,370)
Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 12,093,595,400
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp (1,283,627,101)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 Audited	Rp 10,809,968,299

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C. 3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp2.411.449.396,-**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp2.411.449.396,-** dan **Rp1.283.572.505,-**.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	Rp 1,189,222,920	Rp 1,127,822,295	Rp 61,400,625
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 57,721,620	Rp -	Rp 57,721,620
	Jumlah	Rp 1,246,944,540	Rp 1,127,822,295	Rp 119,122,245
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp 12,093,595,400	Rp 1,283,627,101	Rp 10,809,968,299
	Jumlah	Rp 12,093,595,400	Rp 1,283,627,101	Rp 10,809,968,299
	Total	Rp 13,340,539,940	Rp 2,411,449,396	Rp 10,929,090,544

KEWAJIBAN

C. 4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

**Kewajiban Jangka
Pendek
Rp9.598.773.643,-**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 Audited adalah sebesar **Rp9.598.773.643,-**. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 Audited sebesar **Rp9.595.326.152,-**.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel 46.

Tabel 46
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Aset Lancar	31 Des 2015 Audited	31 Des 2015 Audited
Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 2,578,806,837	Rp 319,057,281
Pendapatan Diterima di Muka	Rp -	Rp 135,416,000
Uang Muka dari KPPN	Rp 4,636,093,012	Rp 7,454,782,424
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 2,383,873,794	Rp 1,686,070,447
	Rp 9,598,773,643	Rp 9,595,326,152

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per Eselon I tersaji pada tabel 47

Tabel 47
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 3,966,311,588	Rp 714,406,953	Rp 3,251,904,635
Majelis	Rp 5,632,462,055	Rp 8,880,919,199	Rp (3,248,457,144)
	Rp 9,598,773,643	Rp 9,595,326,152	Rp 3,447,491

C. 4.1 Utang pada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.578.806.837,-*

Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 Audited sebesar **Rp2.578.806.837,-**. Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 Audited sebesar **Rp319.057.281,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Tabel 48
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2015 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 2,578,806,837	Rp 319,057,281	Rp 2,259,749,556
Majelis	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 2,578,806,837	Rp 319,057,281	Rp 2,259,749,556

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 49.

Tabel 49
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 Audited

No	Uraian Eselon	Jenis Transaksi	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	- Tunjangan pegawai bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017	Rp 2,315,253,248
		- Beban listrik dan telepon bulan Desember yang belum dibayar s.d. tgl 31 desember 2016	Rp 263,553,589
Sub Total			Rp 2,578,806,837
2	Majelis	-	Rp -
Sub Total			Rp -
Total			Rp 2,578,806,837

C. 4.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited adalah masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp135.416.000,-**.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2015 per eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 50
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp 135,416,000	Rp (135,416,000)
Majelis	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp 135,416,000	Rp (135,416,000)

C. 4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp4.636.093.012,-

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 Audited dan 31 Desember 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp4.636.093.012,-** dan **Rp7.454.782.424,-**. Akun ini merupakan penyeimbang Kas di Bendahara Pengeluaran. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel 51
Rincian Uang Muka dari KPPN per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 Audited	31 Des 2015 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 1,330,966,920	Rp 12,390,781	Rp 1,318,576,139
Majelis	Rp 3,305,126,092	Rp 7,442,391,643	Rp (4,137,265,551)
Jumlah	Rp 4,636,093,012	Rp 7,454,782,424	Rp (2,818,689,412)

C. 4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp2.383.873.794,-

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp2.383.873.794,-** dan **Rp1.686.070.447,-**.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 52
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Eselon I	31 Des 2016 <i>Audited</i>	31 Des 2015 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 56,537,831	Rp 247,542,891	Rp (191,005,060)
Majelis	Rp 2,327,335,963	Rp 1,438,527,556	Rp 888,808,407
Jumlah	Rp 2,383,873,794	Rp 1,686,070,447	Rp 697,803,347

EKUITAS

C. 5. EKUITAS

Ekuitas
Rp629.350.597.804,-

Ekuitas per 31 Desember 2016 *Audited* dan 31 Desember 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp629.350.597.804,-** dan **Rp395.087.857.991,-**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian Ekuitas per Eselon-1 disajikan pada tabel 53, sedangkan rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas.

Tabel 53
Rincian Ekuitas per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2016 <i>Audited</i>	31 Des 2015 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 615,673,565,019	Rp 379,059,019,550	Rp 236,614,545,469
Majelis	Rp 13,677,032,785	Rp 16,028,838,441	Rp (2,351,805,656)
Jumlah	Rp 629,350,597,804	Rp 395,087,857,991	Rp 234,262,739,813

D. PENJELASAN ATAS POS_POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Pendapatan PNB
Rp150.623.753,-

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2016 *Audited* dan TA 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp150.623.753,-** dan **Rp153.460.516,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	TA 2016 <i>Audited</i>	TA 2015 <i>Audited</i>	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB Lainnya			
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp150,623,753	Rp153,460,516	(1.85)
Jumlah	Rp150,623,753	Rp153,460,516	(1.85)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa ruang kantor dan ATM Bank BRI, serta sewa rumah dinas oleh pejabat di lingkungan Setjen MPR RI.

D.2. BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai
Rp70.912.223.905,-

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (BA 001) Tahun 2016 *Audited* yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*) Nomor 04/PB.6/2017 berupa koreksi atas pembayaran Tunjangan Representasi Semester I 2016 *Audited* yang dibayarkan melalui mekanisme belanja barang tetapi secara substansi merupakan penghasilan yang dipersamakan dengan tunjangan sebesar Rp1.340.824.575,- sehingga perlu dilakukan jurnal koreksi antar beban yaitu Beban Pegawai pada Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.340.824.575,-.

Jumlah Beban Pegawai untuk TA 2016 *Audited* dan TA 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp70.912.223.905,-** dan **Rp61.472.105.120,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel 54.

Tabel 54
Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 12,893,810,660	Rp 11,587,905,260	11.27
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 209,579	Rp 179,296	16.89
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 844,825,226	Rp 814,940,572	3.67
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 256,171,749	Rp 251,861,834	1.71
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 1,172,514,766	Rp 1,198,745,000	(2.19)
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 32,000,000	Rp 30,620,000	4.51
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 151,799,231	Rp 272,770,852	(44.35)
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 740,784,180	Rp 744,251,120	(0.47)
Beban Uang Makan PNS	Rp 1,975,401,000	Rp 1,947,428,000	1.44
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 537,905,000	Rp 516,965,000	4.05
Beban Gaji Pokok Pejabat	Rp 329,280,000	Rp 305,760,000	7.69
Beban Pembulatan Gaji Pejabat negara	Rp 1,680	Rp 1,440	16.67
Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	Rp 30,576,000	Rp 30,576,000	0.00
Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	Rp 9,828,000	Rp 9,828,000	0.00
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	Rp 1,056,900,000	Rp 1,056,900,000	0.00
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	Rp 187,280,128	Rp 171,998,886	8.88
Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	Rp 15,642,720	Rp 15,786,360	(0.91)
Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	Rp 951,408,000	Rp 878,208,000	8.34
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	Rp 5,154,457,500	Rp 1,173,528,000	339.23
Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	0.00
Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	Rp 440,000,000	Rp 330,000,000	33.33
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	Rp -	Rp 31,463,309,500	-
Beban Uang Lembur	Rp 54,869,000	Rp 89,129,000	(38.44)
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	Rp 43,946,559,486	Rp 8,451,413,000	419.99
Jumlah Beban Pegawai	Rp 70,912,223,905	Rp 61,472,105,120	15.36

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp27.198.396.646,-

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (BA 001) Tahun 2016 *Audited* yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*) Nomor 04/PB.6/2017 berupa koreksi penyajian Beban Persediaan Konsumsi karena kesalahan jurnal penyesuaian pada Laporan Keuangan TA 2016 *Audited* sehingga perlu dilakukan jurnal koreksi Beban Persediaan Konsumsi pada Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp60,-.

Jumlah Beban Persediaan untuk TA 2016 *Audited* dan TA 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp27.198.396.646,-** dan **Rp14.842.595.025,-** Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada tabel 55.

Tabel 55
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2016 *Audited* dan TA 2015 *Audited*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 <i>Audited</i>	TA 2015 <i>Audited</i>	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 25,038,918,790	Rp 12,952,606,194	93.31
Beban Persediaan Bahan Baku	Rp 55,704,000	Rp 70,741,250	(21.26)
Beban Persediaan Lainnya	Rp 2,103,773,856	Rp 1,819,247,581	15.64
Jumlah Beban Persediaan	Rp 27,198,396,646	Rp 14,842,595,025	83.25

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan
Jasa
Rp314.231.819.382,-

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (BA 001) Tahun 2016 *Audited* yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*) Nomor 04/PB.6/2017 berupa koreksi atas pembayaran Tunjangan Representasi Semester I 2016 *Audited* yang dibayarkan melalui mekanisme belanja barang tetapi secara substansi merupakan penghasilan yang dipersamakan dengan tunjangan sebesar Rp1.340.824.575,- sehingga Beban Barang dan Jasa berkurang sebesar Rp1.340.824.575,- jika dibandingkan dengan

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Keuangan *Unaudited*.

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk TA 2016 *Audited* dan TA 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp314.231.819.382,-** dan **Rp287.431.508.771,-**. Beban Barang dan Jasa adalah beban konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 56
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 6,186,727,434	Rp4,374,028,994	41.44
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 16,155,000	Rp16,920,000	(4.52)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 923,889,000	Rp884,191,000	4.49
Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 12,282,031,536	Rp10,860,507,724	13.09
Beban Bahan	Rp 10,248,813,805	Rp9,149,125,332	12.02
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 51,594,360,425	Rp42,298,714,825	21.98
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 154,151,643,630	Rp150,074,301,966	2.72
Beban Langganan Listrik	Rp 2,732,668,847	Rp2,916,256,499	(6.30)
Beban Langganan Telepon	Rp 647,389,492	Rp689,560,648	(6.12)
Beban Langganan Air	Rp 330,534,462	Rp387,814,412	(14.77)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp0	Rp4,845,655	-
Beban Jasa Konsultan	Rp 430,899,500	Rp495,430,000	(13.03)
Beban Sewa	Rp 9,428,932,023	Rp6,302,316,040	49.61
Beban Jasa Profesi	Rp 64,235,666,440	Rp57,796,708,000	11.14
Beban Jasa Lainnya	Rp 1,006,968,488	Rp1,180,147,657	(14.67)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp 15,139,300	Rp640,019	2,265.45
Jumlah Beban Barang dan Jasa	Rp 314,231,819,382	Rp287,431,508,771	9.32

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan
Rp15.709.824.294,-

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk TA 2016 *Audited* dan TA 2015 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp15.709.824.294,-** dan **Rp13.534.609.712,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada tabel 57.

Tabel 57
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 5,651,180,438	Rp4,793,954,252	17.88
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 1,381,486,480	Rp1,052,153,944	31.30
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 7,266,962,053	Rp6,562,920,382	10.73
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp 898,190,000	Rp842,182,000	6.65
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 512,005,323	Rp283,399,134	80.67
Jumlah Beban Pemeliharaan	Rp 15,709,824,294	Rp 13,534,609,712	16.07

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas
Rp296.886.436.401,-

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp296.886.436.401,-** dan **Rp298.382.755.666,-**. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA2016 Audited dan TA 2015 disajikan pada tabel 58.

Tabel 58
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 129,988,750,952	Rp 144,385,479,901	(9.97)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1,529,180,000	Rp 3,128,990,000	(51.13)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 121,540,969,050	Rp 119,762,532,472	1.48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 5,602,179,000	Rp 7,911,746,682	(29.19)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	Rp 37,703,880	Rp 337,024,808	(88.81)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	Rp 38,187,653,519	Rp 22,856,981,803	67.07
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	Rp 296,886,436,401	Rp298,382,755,666	(0.50)

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp3.366.919.787,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp3.366.919.787,-** dan **Rp20.455.297.329,-**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan bagian dari program sosialisasi Ketetapan MPR, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat itu berupa Buku Saku UUD 1945, plakat-plakat, tas sosialisasi, tas ransel untuk keperluan sosialisasi dan seminar, kaos dan celana training sosialisasi, topi sosialisasi dan jaket sosialisasi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited disajikan pada tabel 59.

Tabel 59
Perbandingan Rincian Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 Audited	2015 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	Rp 3,366,919,787	Rp 20,455,297,329	(83.54)
Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan kepada	Rp 3,366,919,787	Rp20,455,297,329	(83.54)

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban penyusutan
dan Amortisasi
Rp18.464.479.087,-*

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp18.464.479.087,-** dan **Rp17.268.415.887,-**. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited disajikan pada tabel 60.

Tabel 60
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 12,031,215,876	Rp10,781,061,415	11.60
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 6,047,282,664	Rp6,012,807,707	0.57
Beban Penyusutan Jaringan	Rp 353,217,581	Rp350,216,238	0.86
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp123,769,766	(100.00)
Beban Amortisasi Software	Rp 32,683,750	Rp0	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 79,216	Rp560,761	(85.87)
Jumlah Beban Penyusutan dan	Rp 18,464,479,087	Rp17,268,415,887	6.93

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

*Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp45.455,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp45.455,-** dan **(Rp357.355,-)**. Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited disajikan pada tabel 61.

Tabel 61
Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	Rp45,455	(Rp178,605)	125,45%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	Rp0	(Rp178,750)	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp45,455	(Rp357,355)	112,72%

D.10. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.201.314.352,-*

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non

Operasional untuk TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp3.201.314.352,-** dan **(Rp173.385.539,-)**.

Tabel 62
Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional
TA 2016 Audited dan TA 2015 Audited

URAIAN	TA 2016 Audited	TA 2015 Audited	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 100,159,000	Rp 20,816,000	381.16
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 100,159,000	Rp20,816,000	381.16
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp 2,383,841,975	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	Rp -	Rp2,383,841,975	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 100,159,000	Rp (2,363,025,975)	(104.24)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 3,132,922,288	Rp 2,189,640,436	43.08
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 97,914,752	Rp14,100,000	594.43
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 2,988,161,934	Rp2,175,360,436	37.36
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	Rp -	Rp180,000	(100.00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp 46,845,602	Rp -	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 31,766,936	Rp -	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp 31,766,936	Rp -	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 3,101,155,352	Rp 2,189,640,436	41.63
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp 3,201,314,352	Rp (173,385,539)	(1,946.36)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal

Rp395.087.857.991,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2015 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp395.087.857.991,- dan Rp387.874.825.520,-

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus(defisit) LO

Rp(743.418.206.852,-

),-

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 *Audited* dan 2015 *Audited* adalah defisit sebesar Rp(743.418.206.852),- dan Rp(713.406.855.178),-.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif

Kebijakan Akuntansi

/Kesalahan

Mendasar Rp0,-

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0,-

E.4 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,-

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 *Audited* dan 2015 *Audited* adalah Rp0,- dan Rp(1.931.366.868,-)

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.5 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp24.878.442,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (BA 001) Tahun 2016 yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*) Nomor 04/PB.6/2017 untuk dilakukan jurnal koreksi atas nilai Beban Persediaan

Konsumsi (Debet) sebesar Rp60,- , hal ini juga sesuai dengan hasil reviu APIP TA 2016 yang menyebabkan berubahnya Koreksi Nilai Persediaan 31 Desember 2016 Audited dari Rp24.878.382,- menjadi Rp24.878.442 dan 31 Desember 2015 Audited Rp0,-.

E.6 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

**Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp245.197.566.097,-**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 Audited dan 2015 Audited adalah sebesar Rp245.197.566.097,- dan Rp0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai yaitu dilakukannya normalisasi atas Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Satker Setjen	Satker Majelis	total
Tanah	Rp 246.201.200.000	0	Rp 246.201.200.000
Peralatan dan Mesin	Rp (132.064.888)	Rp 115	Rp (132.064.773)
Aset Tetap Lainnya	Rp 94.786.915	Rp 128.782.500	Rp 223.569.415
Aset Tak Berwujud	Rp (827.166.775)	Rp (267.971.770)	Rp (1.095.138.545)
Jumlah	Rp 245.336.755.252	Rp (139.189.155)	Rp 245.197.566.097

E.7 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

**Transaksi Antar
Entitas
Rp732.458.502.126,-**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 Audited dan 2015 Audited adalah masing-masing sebesar Rp732.458.502.126,- dan Rp722.551.254.517,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN

Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	734.881.464.333
Diterima dari Entitas Lain	(2.422.962.207)
Jumlah	732.458.502.126

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

E.8 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir

Rp629.350.597.804,-

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp629.350.597.804,- dan Rp395.087.857.991,-.

Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

MPR sebagai lembaga negara mempunyai dua rekening yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan yaitu:

1. Nomor rekening 1020000021060 atas nama Bendahara Pengeluaran Majelis MPR RI di Bank Mandiri Cabang Pembantu DPR RI.
2. Nomor rekening 1220006316668 atas nama Bendahara Pengeluaran Setjen MPR RI di Bank Mandiri Cabang Pembantu DPR RI.

Daftar rekening MPR dapat dilihat pada Laporan Rekening Pemerintah terlampir.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14L Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran Satker Majelis, dan Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016, maka telah dilakukan penggantian pejabat Penanda Tangan SPM yang semula dijabat oleh Usep Supriatna, S. Sos., M. Si. diganti menjadi Dra. Triyatni.

Terdapat aset Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda 4 yang terdiri atas Sedan Toyota Corolla nomor polisi B 2232 LQ sebanyak 1 (satu) unit dan Jeep Ford Escape nomor polisi B 1518 GQ sebanyak 1 (satu) unit yang sudah tidak tersaji di Neraca Laporan

Keuangan MPR RI TA 2016 *Audited* namun masih dalam penguasaan MPR karena aset tersebut sudah diusulkan penghapusannya serta telah mengalami proses lelang namun tidak terdapat penawar atas 2 (dua) aset tersebut.

**Lampiran-Lampiran Pendukung
CaLK**

LAMPIRAN A1

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No	Jenis Aset	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	TANAH		343,728,232,605	-	343,728,232,605
1	Tanah Persil		75,166,182,605	-	75,166,182,605
2	Tanah Non Persil		391,250,000	-	391,250,000
3	Lapangan		268,170,800,000	-	268,170,800,000
B	PERALATAN DAN MESIN		139,263,126,534	108,669,976,001	30,593,150,533
1	Alat Besar Darat	10	1,322,136,200	1,317,921,770	4,214,430
2	Alat bantu	7	6,538,515,090	5,881,384,956	657,130,134
3	Alat Angkutan darat Bermotor	7	13,352,307,500	9,428,201,482	3,924,106,018
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	199,452,000	199,452,000	-
5	Alat Bengkel Bermesin	10	72,215,000	22,357,219	49,857,781
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	86,129,450	70,854,025	15,275,425
7	Alat Ukur	5	117,377,920	101,509,628	15,868,292
8	Alat Kantor	5	15,483,684,269	13,538,141,888	1,945,542,381
9	Alat Rumah Tangga	5	29,742,666,521	26,289,976,863	3,452,689,658
10	Alat Studio	5	43,695,177,190	27,859,837,898	15,835,339,292
11	Alat Komunikasi	5	4,987,463,437	4,545,486,750	441,976,687
12	Peralatan Pemancar	10	972,932,740	681,571,582	291,361,158
13	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	319,984,500	53,330,746	266,653,754
14	Alat Kedokteran	5	2,576,928,220	1,813,695,585	763,232,635
15	Alat Kesehatan Umum	5	8,676,124	4,984,849	3,691,275
16	Unit Alat Laboratorium	8	271,853,560	265,486,624	6,366,936
17	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15	158,620,000	38,551,326	120,068,674
18	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	3,522,530	1,228,736	2,293,794
19	Alat Khusus Kepolisian	2	30,108,400	3,763,550	26,344,850
20	Komputer Unit	4	13,564,271,603	12,046,204,521	1,518,067,082
21	Peralatan Komputer	4	5,469,354,314	4,258,215,510	1,211,138,804
22	Alat SAR	2	5,225,000	5,225,000	-
23	Unit Peralatan Proses Produksi	8	51,969,500	47,720,750	4,248,750
24	Peralatan Olah Raga	3	232,555,466	194,872,743	37,682,723
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		203,328,496,465	41,064,822,659	162,263,673,806
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	200,324,337,135	40,637,408,710	159,686,928,425
2	Bangunan Gedung tempat Tinggal	50	2,969,068,330	423,990,479	2,545,077,851
3	Tugu/Tanda Batas	50	35,091,000	3,423,470	31,667,530
D	JALAN IRIGASI, DAN JARINGAN		13,646,277,700	2,848,477,068	10,797,800,632
1	Instalasi Pembangkit Listrik	40	10,660,860,700	2,231,982,372	8,428,878,328
2	Jaringan Listrik	40	2,985,417,000	616,494,696	2,368,922,304
E	ASET TETAP DALAM RENOVASI		55,842,011,345	-	55,842,011,345
1	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi		504,375,850	-	504,375,850
2	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi		54,979,393,295	-	54,979,393,295
3	Aset Tetap Lainnya Dalam renovasi		358,242,200	-	358,242,200
F	ASET TETAP LAINNYA		4,776,872,570	-	4,776,872,570
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		2,969,586,430	-	2,969,586,430
2	Barang Bercorak Kesenian		1,807,286,140	-	1,807,286,140
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			760,585,017,219	152,583,275,728	608,001,741,491

No	Jenis Aset	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	ASET TAK BERWUJUD		1,246,944,540	1,127,822,295	119,122,245
1	Software		1,189,222,920	1,127,822,295	61,400,625
2	Aset Tak berwujud Lainnya		57,721,620	-	57,721,620
B	ASET LAIN-LAIN		12,093,595,400	1,283,627,101	10,809,968,299
1	Tanah Persil		10,809,760,000	-	10,809,760,000
2	Alat Rumah Tangga		1,283,099,000	1,283,099,000	-
3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		736,400	528,101	208,299
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA			13,340,539,940	2,411,449,396	10,929,090,544
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA			773,925,557,159	154,994,725,124	618,930,832,035



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas di Bendahara Pengeluaran

BA : (001) Majelis Permusyawaratan

No.	Kode Satker	Saldo per 31 Desember 2016					Keterangan
		Nama Satker	Tunai	Saldo Bank		TOTAL	
				Saldo	Bank dan No.Rek		
1	000017	Sekretariat Jenderal	Rp 1,330,966,920	Rp -	122-00-0631666-8	Rp 1,330,966,920	
2	000021	Majelis	Rp 3,305,126,092	Rp -	102-00-0002106-0	Rp 3,305,126,092	
Jumlah			Rp 4,636,093,012	Rp -		Rp 4,636,093,012	

Kas Lainnya dan Setara kas

BA : (001) Majelis Permusyawaratan

No.	Kode Satker	Saldo per 31 Desember 2016					Keterangan
		Nama Satker	Tunai	Saldo Bank		TOTAL	
				Saldo	Bank dan No.Rek		
1	000017	Sekretariat Jenderal	Rp 2,461,687,831	Rp -		Rp 2,461,687,831	
2	000021	Majelis	Rp 5,176,559,970	Rp -		Rp 5,176,559,970	
Jumlah						Rp 7,638,247,801	